

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA MUI
NOMOR 4 TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK SALAM
DALAM JUAL BELI HEWAN LANGKA DI KABUPATEN
NGAWI**



OLEH:

Muhammad Faizzul Fikri

NIM. C92216184

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Faizzul Fikri

NIM : C92216184

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI Nomor
4 Tahun 2014 Terhadap Praktik *Salam* Dalam Jual Beli
Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Faizzul Fikri

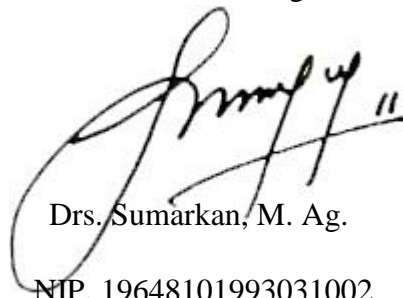
NIM. C92216184

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faizzul Fikri NIM. C92216184 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 November 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sumarkan', with a stylized flourish at the end.

Drs. Sumarkan, M. Ag.

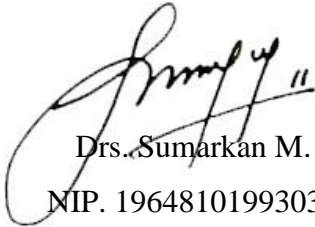
NIP. 19648101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faizzul Fikri NIM. C92216184 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



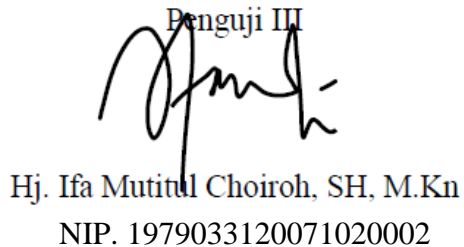
Drs. Sumarkan M. Ag
NIP. 19648101993031002

Penguji II



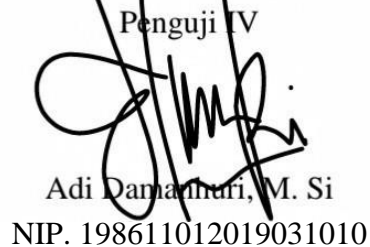
Dr. Hj. Nurlilatul Musyafaah, M. Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Hj. Ifa Mutitil Choiroh, SH, M.Kn
NIP. 1979033120071020002

Penguji IV



Adi Damanhuri, M. Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 25 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faizzul Fikri
NIM : C92216184
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : faizjul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-
lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA MUI NOMOR 4
TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL BELI
HEWAN LANGKA DI KABUPATEN NGAWI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Februari 2021

Penulis

Muhammad Faizzul Fikri

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Praktik Salam Dalam Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang meliputi: Bagaimana praktik akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi?, serta Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 terhadap akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi?

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) di Kabupaten Ngawi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terhimpun dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori *as-salam*, yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang praktek jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sannya praktek akad salam ini dapat merugikan pembeli serta melanggar peraturan tentang jual beli hewan yang dilindungi. Pertama, dengan memperjualbelikan hewan hasil buruan bukan dari hasil peranakan mengakibatkan ketidakjelasan terhadap spesifikasi hewan tersebut sedangkan pematokan harga di pasaran dilihat dari seluruh aspeknya mulai dari usia, kesehatan hewan dan *skill* yang dimiliki. Dari aspek tersebut sangat sulit untuk diketahui apabila hewan tersebut ialah hasil buruan karena semua hewan hasil buruan bersifat liar. Selanjutnya hewan tersebut bisa termasuk kedalam salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak dengan seandainya diperjualbelikan karena semuanya sudah ada prosedurnya tersendiri. Kedua, menurut hukum ekonomi syariah dan fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 praktik akad salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi ini ialah *fasid* karena tidak terpenuhinya syarat akad salam dalam hal tidak diketahuinya spesifikasi barang secara jelas yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) serta barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang haram karena menurut fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian bahwa melarang perburuan serta perdagangan ilegal satwa yang dilindungi kecuali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli untuk memperhatikan secara jelas dan mempertimbangkan ketika hendak memperjualbelikan hewan langka dikarenakan hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi negara serta dapat mengancam kelestarian hewan tersebut di alam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	10

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KONSEP JUAL BELI DENGAN AKAD SALAM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Jual Beli.....	21
1. Definisi Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Macam Jual Beli.....	31
5. Berakhirnya Jual Beli	32
A. Akad Salam	33
1. Definisi Akad Salam	33
2. Dasar Hukum Akad Salam.....	34
3. Syarat Dan Rukun Salam.....	35
B. Gharar Dalam Jual Beli	37
1. Pengertian Gharar	37
2. Hukum Gharar	38
C. Khiyar dalam jual beli	40
1. Pengertian Khiyar	40
2. Macam Khiyar.....	41

D. Ketentuan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa	
1. Pertama: Ketentuan Umum	48
2. Kedua: Ketentuan Hukum	48
E. Ketiga: Ketentuan Penutup.....	50
F. Klasifikasi Satwa Dilindungi	50

BAB III PELAKSANAAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI HEWAN LANGKA DI KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi	51
1. Sejarah Kabupaten Ngawi	51
2. Keadaan Geografis Kabupaten Ngawi.....	53
3. Keadaan Demografi Kabupaten Ngawi	54
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Jual Beli Hewan Langka.....	57
C. Pelaksanaan Akad Salam Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi.....	58

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD SALAM DALAM JUAL BELI HEWAN LANGKA DI KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Praktik Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi .	63
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Salam Dalam Praktik Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi	66
C. Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	80
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Jenis Hewan Dilindungi.....	51
Tabel 2.0 Jumlah penduduk dan keluarga	56
Tabel 2.1 Jumlah keluarga miskin	56

DAFTAR GAMBAR

Foto 1.1 Kartu Tanda Mahasiswa	81
Foto 1.2 Kartu Rencana Studi	81
Foto 1.3 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	81
Foto 1.4 Turnitin dibawah 20%	82
Foto 1.5 Pernyataan Keaslian.....	82
Foto 1.6 Pengajuan Judul	82
Foto 1.7 Pengesahan Proposal.....	82
Foto 1.8 Persetujuan Pembimbing	83
Foto 1.9 Transkrip Nilai	83
Foto 2.1 Kucing Hutan.....	83
Foto 2.2 Burung Serak Jawa (Tyto Alba)	84
Foto 2.3 Burung Elang Ular / Bido	84
Foto 2.4 Landak Jawa (Hystrix Javanica)	84
Foto 2.5 Burung Elang Paria (Black Kite).....	84
Foto 3.1 Wawancara dengan Dian.....	85
Foto 3.2 Wawancara dengan Erik	85
Foto 3.3 Wawancara dengan Diky	85
Foto 3.4 Wawancar dengan Zaka.....	86
Foto 3.5 Wawancara dengan Imam.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam adalah segala bentuk kandungan alam, sebagai nikmat dan kaunia Allah swt yang bisa dieksploitasi dan diolah manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya dan keperluan makhluk-makhluknya. Sumber daya alam tersebut adalah sumber daya mineral, sumber daya laut, sumber daya hutan, dan lain-lain.¹ Dengan penduduk sekitar 264 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat keempat Negara berpenduduk terbesar didunia dan negara yang memiliki pulau dengan jumlah 17.000 yang terbentang dai daratan Asia Tenggara hingga Australia. Meskipun dengan luas wilayah darat Indonesia hanya 1,3% dari seluruh luas wilayah darat di dunia, namun didalamnya terkandung 10% dari spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptile dan amfibi, serta 17% dari spesies burung di dunia.

Menurut UULH Tahun 1982 bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

¹ Ulfa Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam dan Sains*. (Malang: UIN Malang Press, 2014) 6.

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.² Seperti yang diterangkan pada Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 1982, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa di dalam suatu ekosistem terdapat makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Maka disitulah terdapat juga mata rantai kehidupan. Di suatu ekosistem pasti terdapat mata rantai dan setiap ekosistem mata rantai tersebut berbeda-beda tergantung pada letak geografis suatu ekosistem tersebut.

Dalam tatanan masyarakat Islam di Indonesia dikenal Majelis Ulama Indonesia sebagai pengawal bagi penganut agama Islam dengan cara merumuskan dan mengajukan permasalahan yang akhirnya diahirkan sebuah fatwa yang sebagai penentu arah kehidupan umat Islam di Indonesia. Terdapat salah satu Fatwa yng berkaitan dengan pentingnya melestarikan ekosistem di alam yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem dijelaskan bahwa satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara, mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam

² Zoer'aini Djamal Irwan, " *Prinsip-Prinsip Ekologi*". (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 28.

menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.³ Untuk menjaga kelestarian semua sumber daya alam tersebut diciptakan sebuah gagasan yang disebut konservasi.

Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.⁴

Mulai tahun 1970-an konservasi sumber daya alam di Indonesia berkembang dan memiliki suatu strategi yang salah satu tujuan utamanya ialah menjaga pelestarian dan menjamin keaneka ragaman genetik. Salah satu badan yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk melestarikan ekosistem di Indonesia ialah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Balai tersebut menangani segala hal yang terjadi pada kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pelestarian cagar alam, pelestarian hutan, dan pelestarian satwa langka yang dilindungi.

Meskipun konservasi sudah dilakukan, Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang kerusakan ekosistem

³ Lihat di Ketentuan Umum Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014.

⁴ Ulfa Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam dan Sains*, 185.

didalamnya salah satunya tentang satwa liar yang terancam punah. Yang termasuk satwa alami (hidup liar) mencakup “*coral reef*” (terumbu karang), insekta (serangga), amphihi, reptilian, aves (unggas/burung dan mamalia).⁵ Diartikan hampir punah karena populasi mereka di alam bebas sudah sangat kecil.

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut ialah berkurang atau rusaknya habitat mereka di alam bebas serta perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang diperjualbelikan di pasar adalah hasil tangkapan liar, bukan hasil dari penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dijual dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.⁶

Permasalahan itu banyak dijumpai di Kabupaten Ngawi dimana ekosistem satwa disana mulai terancam rusak salah satunya karena maraknya praktek jual beli tersebut. Banyak faktor yang melatar belakangi masih maraknya perburuan dan praktik jual beli hewan langka tersebut. Seperti faktor ekonomi dan faktor sosial. Dikarenakan kawasan hutan di Kabupaten Ngawi masih luas serta tersebarnya hewan hewan langka, banyak dimanfaatkan oleh mereka untuk mencari peruntungan dengan cara menjual nya. Hal itu adalah akibat dari kurangnya kesadaran sosial akan pentingnya melestarikan dan menjaga alam dan ekosistem dialamnya.

⁵ Ibid, 232.

⁶ Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*. (Malang: Pro Fauna, 2010) 1.

Banyak cara yang digunakan dalam praktek perdagangan satwa yang dilindungi. Mulai dari perdagangan secara langsung maupun pesanan. Perdagangan secara langsung ialah jual beli yang terjadi pada satu majelis dan penyerahan barangnya secara langsung. Sedangkan jual beli secara pesanan ialah dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu hewan dengan kriteria-kriteria serta kesepakatan tertentu dan penyerahan barang dilakukan di akhir. Dalam hukum islam jual beli dengan cara pesanan disebut *as-salam*. Akad *as-salam* sendiri adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah ditentukan pada waktu perjanjian dibuat.⁷

بانه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثلث لأجل

“Salam adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang”.

Dalam akad *as-salam* prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.⁸ Namun dalam praktiknya, jual beli satwa dengan akad *as-salam* yaitu pembeli membuat kontrak kesepakatan dengan penjual tentang spesifikasi satwa yang akan dipesan. Kemudian pembeli memberikan DP sesuai kesepakatan sebagai tanda pemesanan satwa tersebut. Lalu penjual satwa akan mencari barang dengan spesifikasi

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah) 2015, 243.

⁸ Muh Sholihuddin, dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*. (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 115.

yang telah disepakati. Mayoritas hewan tersebut berasal dari hasil buruan di alam bebas.

Setelah mendapatkan satwa penjual menyerahkan satwa kepada pembeli dengan pelunasan di akhir kontrak. Apabila satwa yang telah ada tidak jadi diambil oleh pembeli, penjual tidak mengembalikan uang DP yang telah disepakati. Lain halnya jika satwa yang telah dipesan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka penjual akan mencari satwa sesuai keinginan pembeli tanpa meminta uang DP tambahan. Yang menjadi permasalahan ialah ketidakjelasan terkait berapa usia hewan tersebut. Dikarenakan mayoritas hewan yang diperjual belikan ialah hasil buruan yang secara ilmiah tidak diketahui berapa umur hewan tersebut meskipun dengan cara mengira-ngira berapa usia hewan tersebut, namun tetap saja hal tersebut ialah bentuk ketidakjelasan yang pada hukum islam dinamakan sebagai *gharar*. Ketidakjelasan dalam akad tersebut, besar kemungkinan terjadi penipuan terhadap berapa usia hewan tersebut.

Dari gambaran diatas, perlu kiranya untuk dikaji dari segi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelestarian Satwa Langka sehingga menemukan hukum jual beli satwa langka dengan akad salam tersebut. Berangkat dari itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Salam Dalam Jual Beli Satwa Langka Di Kabupaten Ngawi”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. Maraknya tindak pidana jual beli hewan langka di wilayah hukum Kabupaten Ngawi.
- b. Faktor yang melatar belakangi maraknya kegiatan jual beli hewan langka secara illegal di Kabupaten Ngawi.
- c. Mekanisme akad salam pada jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.
- d. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.
- e. Ketidak jelasan usia hewan buruan.

Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada judul, maka penulis membatasi masalah dengan perumusan sebagai berikut:

- a. Mekanisme akad salam pada jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.
- b. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme akad salam pada jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 terhadap akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi?

D. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat keaslian penelitian ini dan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah melakukan penelitian, maka peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki korelasi yang sama dengan tema dan topik pada skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, terdapat beberapa perbedaan pembahasan antara skripsi sebelumnya dengan skripsi sekarang. Berikut ini adalah beberapa skripsi terdahulu :

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Sulistyo Budi Prabowo yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Yogyakarta. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah pada konteks pembahasannya. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo Budi Prabowo menjelaskan tentang penegakan hukum terkait tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini dibahas mengenai sah tidaknya jual beli satwa langka di Kabupaten Ngawi.⁹

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Kholaf Hibatullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jua Beli Busana Di Kusuma *Fashion* Dengan Sistem *Online Booking No Cancel* Di Surabaya”. Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai perbedaan pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Kholaf Hibatullah menggunakan objek busana yang dijual di Kusuma *Fashion*. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang digunakan ialah hewan langka yang diperjualbelikan di Kabupaten Ngawi.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Ainiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Pre Order Online* Di Toko *Online Comfortable Clothing* Sidoarjo”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai praktek biaya tambahan di *online shop* dengan akad salam. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai hukum jual beli menggunakan akad salam dengan objek hewan langka.¹¹

⁹ Sulistyo Budi Prabowo, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta*”. UIN Sunan Kalijaga, 2018.

¹⁰ Kholaf Hibatullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jua Beli Busana Di Kusuma Fashion Dengan Sistem Online Booking No Cancel Di Surabaya*”. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

¹¹ Skripsi Qurrotul Ainiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pre Order Online Di Toko Online Comfortable Clothing Sidoarjo*”. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Dari ketiga judul skripsi tersebut, perbedaan yang mendasar dengan skripsi ini terletak pada objek yang dikaji serta adanya ketidakjelasan dalam jual beli atau disebut *gharar*.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad salam pada jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pengembangan studi hukum Islam pada jual beli menggunakan akad salam serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk bahan penelitian lebih lanjut.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat terkait jual beli hewan langka. Karena hingga saat

penelitian ini dilakukan, masih marak terjadi penjualan hewan yang dilindungi.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca memahami tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai pokok kajian yang dibahas, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu program studi yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini hukum ekonomi syariah digunakan untuk mencari aturan yang terdapat dalam suatu akad yang digunakan dalam jual beli hewan langka.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Dalam penelitian ini fatwa digunakan untuk menganalisis apakah suatu akad jual beli hewan langka ini sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Jual beli hewan langka dengan akad salam adalah salah satu bentuk jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang akad salam dalam jual beli hewan langka.

4. Hewan langka adalah keadaan dimana jenis binatang dengan populasi kecil didunia, yang ada pada kedudukan mengandung resiko terancam kepunahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan data dari buku panduan identifikasi satwa dilindungi milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Peneliti menjelaskan jual beli hewan langka dengan akad salam mulai dari pembeli memesan hewan hingga penyerahan hewan oleh penjual.

Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Salam Dalam Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi”** adalah pelaksanaan transaksi jual beli hewan langka dengan menggunakan akad salam. Hal ini kemudian akan dianalisa menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa yang dikeluarkan MUI yakni Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian tersebut.¹² Maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Field Research

¹² Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan” (Yogyakarta: Rineka, 1998), 194.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *field research*/studi kasus. Penggunaan teknik studi kasus dikarenakan penelitian dilakukan dengan cara pengkajian terhadap kasus dan peristiwa yang ditemukan di lapangan.¹³ Dimana penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang valid dan terpercaya dengan cara mengamati langsung melalui pengambilan data hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli hewan langka yang ada di Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dari lapangan kemudian di filter sebelum kemudian di analisis secara deskriptif. Sehingga akan mempermudah dalam penelitian pada permasalahan terkait jual beli hewan langka dengan akad salam di Kabupaten Ngawi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah hukum Kabupaten Ngawi, dimana terdapat beberapa kecamatan yang menjadi tempat transaksi jual beli. Yakni di Kecamatan Paron, Kecamatan Kedunggalar, dan Kecamatan Ngawi.

3. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diemukakan di atas, maka data yang dapat dikumpulkan antara lain:

- a. Gambaran umum Kabupaten Ngawi

¹³ Ibid, 172.

- b. Faktor yang melatar belakangi penjualan hewan langka.
- c. Pelaksanaan akad salam jual beli hewan langka
- d. Wawancara kepada penjual dan pembeli.

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar mendapat data yang akurat terkait jual beli hewan langka dengan akad salam di Kabupaten Ngawi, meliputi sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer disini adalah data yang berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada objek yang terlibat untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Dimana data primer ini bisa didokumenterkan melalui rekaman atau dicatat oleh peneliti.¹⁴

Data tersebut antara lain:

- 1) Penjual hewan langka lingkup Kabupaten Ngawi.
- 2) Pembeli hewan langka.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan sebagai pelengkap dari data primer.¹⁵ Dalam

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 106.

¹⁵ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.

penelitian ini yang dapat digunakan sebagai data sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian.¹⁶ Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumbernya langsung secara tatap muka.¹⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan penjual hewan langka lingkup Kota Ngawi serta pembeli hewan langka. Data penjual disini yaitu Eko, Erik, dan Imam. Sedangkan pembeli meliputi Diki, Dian, dan Zaka

b. Dokumenter

Dokumenter yaitu suatu data yang didapat dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 74.

¹⁷ HM Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012). 117.

buku atau dokumen yang sifatnya resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁸

c. *Observasi*

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, bahwasannya penulis melakukan observasi pada penjual hewan langka di Kabupaten Ngawi dengan cara melihat sendiri proses terjadinya akad pada saat penyerahan hewan langka.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta lapangan yang terjadi di lapangan.¹⁹

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : CV Alfabeta, 2008), 234.

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁰ Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan peneliti dapat mendapatkan gambaran tentang jual beli hewan langka dengan akad salam di Kabupaten Ngawi.

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisa lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.²¹ Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana praktik akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi.

7. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli dengan akad salam terhadap jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi kemudian dianalisis dengan menurut teori Hukum Ekonomi Syariah

²⁰ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Aksara, 1997), 153.

²¹ Ibid, 195.

dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Hewan Langka.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif adalah cara berfikir diambil dari pernyataan yang bersifat umum selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori dari praktik akad salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi. Selanjutnya dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah dan fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian hewan langka.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, maka disusunlah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi uraian kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik salam dalam jual beli hewan langka. Dalam bab ini berisi uraian deskriptif mengenai kerangka teoritis terkait dengan

konsep jual beli pesanan secara umum maupun dalam pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian mengungkapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli salam, termasuk didalamnya mengenai fatwa MUI tentang pelestarian hewan langka.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai jual beli hewan langka dengan akad salam di Kabupaten Ngawi. Dalam bab ini memuat tentang profil penjual hewan langka dan pembeli, cara pemesanan hewan langka dari penjual, faktor yang melatarbelakangi penjualan hewan langka, dan problematika dalam jual beli hewan langka dengan akad salam.

Bab keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian, bab ini memuat analisis mekanisme akad salam dalam jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi dan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Hewan Langka.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan pada bab sebelumnya. Serta saran-saran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DENGAN AKAD SALAM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *bai'*, yaitu:

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, istilah lain dari kata *al-bai'* adalah *at-tijarah*, *al-mubadalah*, dan *al-shira'*. Dengan begitu kata *al-bai'* berarti “jual” dan juga berarti “beli”.¹ Adapun pengertian *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda (barter), atau pertukaran benda dengan uang.²

a. Adapun pengertian jual beli secara *terminologi* (istilah) dapat di definisikan sebagai berikut:

- 1) Penukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama (berupa alat tukar yang sah).

¹ Suqiyah Musafa'ah. dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: IAIN SA Press), 2013, 57.

² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi), (Depok: PT Kharisma Putra Utama), 15.

- 2) Memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*).
 - 3) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.³
- b. Menurut madzab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ucapan *ijab* dan *qobul*.
 - c. Menurut imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.
 - d. Menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki dan memiliki.⁴
 - e. Menurut B.W adalah sesuatu perjanjian timbal balik dimana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵

Dari berapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai

³ Syaiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 96.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Penyantar fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1989), 1.

nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun. Dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa firman Allah yang membicarakan tentang jual beli:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS.Al Baqarah:275)⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari rezeki dari Tuhanmu”
(QS.Al-Baqarah:198)⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),69.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka,2010),45.

⁸ Ibid,31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisā’:29)⁹

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli akad dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama’ Hanāfiyah dengan jumhur ulama’. Rukun jual beli menurut ulama’ Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual), menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indeks yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: CV Diponegoro), Surah An-Nisa ayat 29.

¹⁰ Suqiyah Musafa’ah. dkk, “*Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*”, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 62.

Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
- 2) Ada *ṣighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*);
- 3) Ada barang yang dibeli;

Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad

Syarat orang yang berakad ialah berakal. Maka dari itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Namun anak kecil yang telah *mumayyiz* menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka hukumnya sah. Sebaliknya, apabila akad tersebut membawa kerugian baginya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewaqafkan

¹¹ Maradani, "*Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Kencana, 2013),21.

atau menghibahkannya, maka hukumnya tidak boleh dilaksanakan.¹²

Selain itu pihak yang berakad ialah kedua orang yang berbeda, dalam arti seseorang tidak bisa melakukan jual beli dalam waktu bersamaan sebagai pihak penjual sekaligus pembeli.

2) Baligh dan berakal

Orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisā' (4) 5, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ....

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).”¹³

Anak kecil dikecualikan dari kaidah diatas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula.¹⁴

¹² Abdul Rahman Ghazaly, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 72.

¹³ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: CV Diponegoro), Surah An-Nisa ayat 5.

¹⁴ Syaiful Jazil, “*Fiqh Mu’amalah*”, 99.

3) Yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak

Karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.¹⁵

a) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. Berdasarkan sabda nabi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“*Bai*’ (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).” (H.R. Ibnu Majah).¹⁶

Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang dia lakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila seseorang dipaksa membeli.¹⁷

¹⁵ Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 26.

¹⁶ Abdur Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 69.

¹⁷ Syaiful Jazil, “*Fiqh Mu’amalah*”, 99.

b) Adapun syarat dalam *sighat ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (menurut jumhur ulama') atau telah berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, contohnya: "Saya jual buku ini dengan harga sepuluh ribu," lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga sepuluh ribu."
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Di zaman modern ini perwujudan *ijāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang akan dibeli, dan pembeli membayarkan uang pada penjual, sehingga penjual menerima uang dan pembeli menerima barang tanpa ucapan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, apabila hal itu telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat karena itu telah menunjukkan unsur *rida* dari kedua belah pihak. Selain itu, *ijab qabul* juga bisa dilakukan secara tulisan atau melalui perantara.

c) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya. Dasar hukumnya adalah H.R. Bukhārī dan Muslim:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.”¹⁸

- b. Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁹ Begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan yang sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli pasir di

¹⁸ HR. Bukhari nomor 2236.

¹⁹ Suqiyah Musafa'ah. dkk, 2013, “*Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*”, 65-66.

tengah padang, jual beli air laut yang masih dilaut karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.²⁰

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting dalam kegiatan jual beli. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama' fiqh membedakan antara *atsaman* (الثلمن) dan *al-si'r* (السعر). Menurut ulama' fiqh, *atsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).

Oleh sebab itu, para ulama, *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *atsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan waktu akad, sekalipun pembayarannya menggunakan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu

²⁰ Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", 26-27.

dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar dan bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi, *khamar*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.²¹

4. Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang sah (*sahih*)

Jual beli yang sah (*sahih*) merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syariat baik rukun maupun syaratnya, tidak ada kaitan dengan hak orang lain.

- b. Jual beli yang tidak sah.

Jual beli yang tidak sah, dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi yang tidak sah itu ada dua, yaitu:

- 1) Jual beli yang batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

²¹ Maradani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.24-25

- 2) Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas dan ketidakjelasan dapat menciptakan sengketa, seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*.²²

5. Berakhirnya Jual Beli

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya, selain telah tercapai tujuannya, berakhirnya dan selesainya jual beli karena beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.
2. Harus dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
3. Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.
4. Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.²³ Ketika barang yang dibeli telah diterima oleh pembeli dan uang yang dibayarkan telah diterima oleh penjual, maka proses jual beli juga berakhir. Karena kedua belah

²² Wahab Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta:Gema Insani, 2017), 90-92

²³ PPHIMM, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi)", Depok: PT Kharisma Putra Utama, 34.

pihak telah mendapatkan apa yang diinginkan, dan telah menguntungkan kedua belah pihak.

B. Akad Salam

1. Definisi Akad Salam

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.²⁴

Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *alaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakna: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli

²⁴ Djuwaini Dimyauddin. “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, 129.

membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.²⁵

2. Dasar Hukum Salam

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada dalam majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya akad *salam* ini sebagai berikut.

a. Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*²⁶

Dari Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 tersebut dapat dipahami

bahwa transaksi dengan cara berhutang itu hukumnya dibolehkan.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW dalam *atsar* Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’I, Thabrani, Al-Hakim dan Baihaqi, dan dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّوْا اللُّوْ فِي كِتَابِنَا

²⁵ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2016, 94.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 459.

بِوَأَذِنَ فَيُوثِقُ رَأْسَ الْإِيَّةِ.

“Saya bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya saaf (*salam*) yang ditanggungkan (dijanjikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan, kemudian beliau membaca ayat ini.”²⁷

3. Syarat Dan Rukun Salam

Dalam praktik salam haruslah sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam. Adapun syarat dan rukun *bay as-salam* sebagai berikut:

- a. *Muslam* (pembeli atau pemesan)
- b. *Muslam ilaih* (penjual atau penerima pesanan)
- c. *Muslam fih* (barang yang dipesan dan diserahterimakan)
- d. *Ra's al-mal* (harga barang atau modal)
- e. *Sighat* (serah terima atau ijab kabul).²⁸

Sedangkan syarat *bay' as-salam* sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*muslam* dan *muslam ilaih*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan bahwa orang yang berakad haruslah berakal atau mummayiz, untuk anak-anak minimal berumur tujuh tahun dan pembicaraan serta jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami. Oleh karena itu,

²⁷ Ahmad Wardhi Muslih, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 244.

²⁸ Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, Cet. II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 48.

anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.²⁹

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa orang yang berakad haruslah baligh, berakal, dan telah mampu memelihara agama dan hartanya. Ulama Hanabilah membolehkan anak kecil untuk bertransaksi namun atas izin walinya.³⁰

b. Syarat barang yang dipesan atau *muslam fih*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 dijelaskan bahwa syarat barang yang dipesan atau *muslam fih* adalah:

- 1) Kualitas dan kuantitas barang telah diketahui
- 2) Kuantitas barang dapat ditakar menggunakan takaran atau timbangan dan atau meteran
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan haruslah diketahui secara sempurna oleh kedua belah pihak.³¹

c. Syarat modal atau *ra's mal*

Syarat modal yang harus dipenuhi dalam akad *bay' as-salam* adalah modal haruslah diketahui. Barang yang akan diperjualbelikan haruslah diketahui jenisnya, ukuran, kualitas,

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 74.

³⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

³¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi), Depok: PT Kharisma Putra Utama, 37.

dan kuantitasnya. Hukum awal terkait pembayaran haruslah dalam bentuk tunai.³² Sedangkan dalam pembayaran uang dalam akad salam menurut mayoritas ulama di tempat kontrak dan diketahui secara rinci oleh kedua belah pihak agar mencegah praktik riba dalam mekanisme akad salam.³³

d. Syarat *sighat*

Dalam mahzab Hanafi, Maliki dan Hambali mengharuskan dalam ijab dan qabul menggunakan lafal *salam* (memesan), *salaf* (memesan).³⁴

C. Gharar Dalam Jual Beli

1. Pengertian Gharar

Pengertian jual beli gharar itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian jual beli gharar menurut bahasa adalah samara tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, waktunya, dan tempatnya.³⁵ Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan³⁶ adalah : Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu

³² Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 127.

³³ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, 127.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 240.

³⁵ Peter Salim, dkk. “*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*”, (Jakarta: Modern Englis Pres, 1999), 226.

³⁶ M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo

akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* ialah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.³⁷

2. Hukum Gharar

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).³⁸ Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Persada, 2003), 147-148.

³⁷ Ghufroon A. Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontektual*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

³⁸ Nadratuazzaman Hosen, Jurnal *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jakarta: Al-Iqtisad, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu: QS Al-Baqarah 188 dan QS an-Nias 29

Begitupun didalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.³⁹ *Gharar* yang dilarang secara umum menurut Ibnu Ja'I Maliki, yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
5. Tidak diketahui masa yang akan datang
6. Menghargakan dua kali pada suatu barang
7. Menjual barang yang diharapkan selamat
8. Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli
9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-meempar

Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Saiful Jazim, *Fikih Mu'amalah*, Surabaya: UINSA Press, 2014, Hal, 107

D. Khiyar Dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

Khiyar dalam bahasa (Arab) merupakan *isim masdar* ¹

رَٰلْخِيَا yang bermakna pilihan dan bersih. Sedangkan menurut arti istilah, *khiyar* berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.⁴¹ Menurut Sayid Sabiq *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.⁴²

Berdasarkan pengertian *khiyar* secara bahasa ataupun istilah dapat disimpulkan bahwa *khiyar* merupakan hak pilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli atas transaksi yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kebaikan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

2. Macam Khiyar

a. Khiyar Majelis

1) Pengertian Khiyar Majelis

Khiyar Majelis adalah hak setiap *Aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah yang berarti Artinya suatu akad belum berpisah *lazim* (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad

⁴¹ Enang Hidayat, “*Fiqh Jual Beli*”, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015) 32.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010), 216.

yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain.⁴³

2) Berakhirnya Khiyar Majelis

Pada kegiatan jual beli *Khiyar majlis* berakhir dengan adanya beberapa hal yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli yaitu:

- a) Berpisahnya kedua belah pihak yang berakad dari majlis

Adapun maksud dari berpisah adalah meninggalkan tempat transaksi yang menurut ukuran tradisi dinilai sebagai perpisahan. Hal yang dinilai oleh kebanyakan orang sebagai perpisahan maka transaksi dalam jual beli dapat berarti sudah jadi atau batal.⁴⁴

- b) *Takhayyur* (penjatuhan tempo untuk memilih)

Adapun maksud dari *takhayyur* adalah keduanya memilih meneruskan akad atau membatalkannya secara jelas atau dengan petunjuk. Maksud pembatalan secara jelas adalah melakukan pembatalan secara langsung dengan ucapan memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli, sedang pembatalan dengan petunjuk maksudnya adalah salah satu *aqadain* (dua orang yang

⁴³ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002), 109.

⁴⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'inditerjemahkan oleh Moch Anwar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 795.

berakad) melakukan tindakan dengan barang yang di khiyarkan, seperti menggunakannya.⁴⁵

c) Hilangnya kemampuan

Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini yaitu pertama menurut pendapat kalangan ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Zaidiyah dan Imamiyah jika salah satu pihak yang berakad kehilangan kemampuannya dalam majlis akad seperti menjadi gila atau pingsan maka khiyarnya tidak berakhir namun berpindah kepada walinya kemudian ia meneruskannya.

Sedang menurut kalangan ulama mazhab hambali mereka menyatakan bahwa jika ia kehilangan kemampuan, maka khiyarnya tidak berakhir dengan gila, apalagi yang hanya pingsan maka dia tetap ada khiyar, tidak berpindah pada walinya sebab keterkaitan dengan barang yang dijual atau tidaknya hanya bisa diketahui lewat jalurnya.⁴⁶

b. Khiyar Syarat

1) Pengertian Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak *aqidain* untuk melangsungkan atau membatalkannya selama batas waktu

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), 163.

⁴⁶ Ibid.

tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Sesungguhnya adanya *khiyar syarat* adalah dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari kecurangan yang berakad.⁴⁷

2) Berlakunya Khiyar Syarat

Masa berlaku *khiyar syarat* terdapat beberapa pendapat *fuqaha*. Enurut Hanafiyah selama tiga hari atau kurang, menurut Syafi'iyah tiga hari atau kurang, sedangkan menurut Malikiyah tergantung dari barang apa yang diperjualbelikan. Apabila benda yang diperjualbelikan ialah benda tetap atau bangunan maka masa *khiyar* nya selama 38 hari. Untuk barang-barang dagangan, seperti pakaian maka masa berlaku *khiyar* tersebut selama tiga sampai lima hari. Sedangkan untuk *khiyar* terhadap binatang berlaku selama tiga sampai lima hari. Serta *khiyar* dalam hamba sahaya, yaitu antara delapan sampai sepuluh hari.⁴⁸

3) Berakhirnya Khiyar Syarat

Menurut KHEI Pasal 272 berakhirnya khiyar syarat adalah dijelaskan sebagai berikut: apabila masa khiyar telah lewat, sedang para pihak yang mempunyai hak

⁴⁷ Gufron A Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, 111.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 229.

khiyar tidak menyatakan pembatalan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.”⁴⁹

c. Khiyar Aib

1) Pengertian Khiyar Aib

Khiyar Aib yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁵⁰

2) Syarat Khiyar Aib

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyar aib* setelah terjadinya beberapa tindakan sebagai berikut:

2. Adanya *aib* setelah akad atau sebelum diserahkan yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, *aib* tersebut tidak tetap.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan menerima barang, sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyar* sebab ia dianggap sudah ridho.

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi), Depok: PT Kharisma Putra Utama, 80.

⁵⁰ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 112.

4. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya, tidak ada *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya.⁵¹

d. Khiyar Ruyah

1) Pengertian Khiyar Ruyah

Khiyar ruyah adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad. Pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.⁵²

2) Syarat Khiyar Ruyah

Adapun terkait dengan syarat *khiyar ruyah* terdapat beberapa ketentuan yang harus ada, yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet. 5, 117.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 236.

- a) Objek akad berupa barang, dengan demikian jual beli uang الصَّرْفِ يَعْ بَ *khiyar* tidak berlaku.
- b) Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku.⁵³

E. Ketentuan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus. Fatwa DSN-MUI muncul sebagai respon atas persoalan kekinian yang berkaitan tentang ekonomi Islam.

Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56)⁵⁴

Hadis Rasulullah SAW tentang perintah menyayangi makhluk hidup di bumi termasuk satwa.

Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda yang artinya:

"Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

⁵³ Ibid, 238..

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 230.

oleh Dzat yang di langit”.

(HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim)⁵⁵

1. Pertama: Ketentuan Umum

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.⁵⁶

2. Kedua: Ketentuan Hukum

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:

⁵⁵ HR Abu Daud (Shahihul jami), 3522.

⁵⁶ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka, h, 10.

- e. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak.
 - f. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya.
 - g. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya.
 - h. menjaga keutuhan habitat.
 - i. mencegah perburuan dan perdagangan illegal.
 - j. mencegah konflik dengan manusia.
 - k. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
- a. menjaga keseimbangan ekosistem;
 - b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
 - c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
 - d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.⁵⁷

3. Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.⁵⁸

F. Klasifikasi Satwa Yang Dilindungi

Dalam memelihara hewan langka ini perlu diketahui apakah hewan tersebut termasuk kedalam hewan yang boleh dipelihara serta diperjualbelikan atau dilarang. Untuk mengetahui klasifikasi tersebut dapat dilihat pada buku panduan identifikasi hewan dilindungi milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam serta merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

⁵⁷ Ibid, 13.

⁵⁸ Ibid, 15.

106 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis hewan yang diperjualbelikan seperti burung hantu *Tyto Alba*, alap-alap, elang jawa, dan mamalia seperti kucing hutan, musang, serta landak.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 106 tentang Jenis Tumbuhan Dan Hewan Yang Dilindungi ialah sebagai berikut:

Nama Ilmiah	Nama Indonesia
<i>Prionailurus planiceps</i>	Kucing Tandang/Kucing Hutan
<i>Hystrix javanica</i>	Landak Jawa
<i>Elanus caeruleus</i>	Elang Tikus
<i>Falco berigora</i>	Alap-Alap Coklat
<i>Microhierax latifrons</i>	Alap-Alap Dahi Putih
<i>Otus angelinae</i>	Celepuk Jawa

Tabel 1.1 Jenis Hewan Dilindungi

Sedangkan untuk burung hantu tidak semua dilarang. Ada jenis burung hantu yang bebas diperjualbelikan salah satunya ialah burung hantu serak jawa atau *Tyto Alba* yang biasa digunakan petani untuk mengusir hama tikus dipersawahan. Serta untuk burung hantu beluk jampuk atau *Bubo Sumatranus* dimana merupakan salah satu hewan yang seringkali diperjualbelikan tidak termasuk kedalam kategori hewan yang dilindungi oleh undang-undang.

BAB III

PELAKSANAAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI HEWAN LANGKA DI KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Kabupaten Ngawi

Nama ngawi berasal dari “awi” atau “bambu” yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau “ng” menjadi “ngawi”. Apabila diperhatikan, di Indonesia khususnya jawa, banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang dikaitkan dengan flora, seperti : Ciawi, Waringin Pitu, Pelem, Pakis, Manggis dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan ngawi yang berasal dari “awi” menunjukkan suatu tempat yaitu sekitar pinggir ”Bengawan Solo” dan ”Bengawan Madiun” yang banyak tumbuh pohon “awi”. ”awi” atau ”bambu” dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai nilai sejarah, yaitu dalam bentuk ”bambu runcing” yang menjadi salah satu senjata untuk melawan dan mengusir penjajah yang ternyata senjata dari ”bambu” ini ditakuti dari pihak lawan (digambarkan yang ”terkena” akan menderita sakit cukup lama dan ngeri).

Berdasarkan penelitian benda-benda kuno, menunjukkan bahwa di Ngawi telah berlangsung suatu aktifitas keagamaan sejak pemerintahan Airlangga dan rupanya masih tetap bertahan hingga masa akhir Pemerintahan Raja Majapahit. Fragmen-fragmen Percandian menunjukkan sifat kesiwaan yang erat hubungannya dengan pemujaan

Gunung Lawu (Girindra), namun dalam perjalanan selanjutnya terjadi pergeseran oleh pengaruh masuknya Agama Islam serta kebudayaan yang dibawa Bangsa Eropa khususnya Belanda yang cukup lama menguasai pemerintahan di Indonesia, disamping itu Ngawi sejak jaman prasejarah mempunyai peranan penting dalam lalu lintas (memiliki posisi Geostrategis yang sangat penting).

Dari 44 desa penambangan yang mampu berkembang terus dan berhasil meningkatkan statusnya menjadi Kabupaten Ngawi sampai dengan sekarang. Ngawi sebagai Daerah Swatantra dan Nadi-tira pradesa, pada jaman Pemerintahan Raja Hayam Wuruk (Majapahit) tepatnya tanggal 7 Juli 1358 Masehi, (tersebut dalam Prasasti Canggal yang berangka Tahun Saka 1280).

Ngawi sebagai Daerah Narawita Sultan Yogyakarta dengan Palungguh Bupati – Wedono Moncongoro Wetan, tepatnya tanggal 10 Nopember 1828 M (tersebut dalam surat Piagam Sultan Hamengkubuwono V tertanggal 2 Jumadil awal 1756 AJ). Ngawi sebagai Onder-Regentschap yang dikepalai oleh Onder Regent (Bupati Anom) Raden Ngabehi Sumodigdo, tepatnya tertanggal 31 Agustus 1830 M. Adapun Ngawi yang berstatus sebagai Onder – Regentschap dinaikkan menjadi regentschap atau kabupaten, karena disamping letak geografisnya sangat menguntungkan juga memiliki potensi yang cukup memadai.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Ngawi

a. Letak Daerah

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 70 21' – 70 31' Lintang Selatan dan 110 10' – 111 0 40' Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu.

Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : Kabupaten Madiun
- b. Sebelah barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah)
- c. Sebelah utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah)
- d. Sebelah selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,98 km², di mana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km² berupa lahan sawah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan.

3. Keadaan Demografi Kabupaten Ngawi

a. Keadaan Penduduk

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di tiga kecamatan yang terdapat akad jual beli hewan langka meliputi Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Paron, dan Kecamatan Ngawi. Dalam data terakhir tahun 2020, jumlah penduduk ketiga kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah KK		
	Wilayah Perkotaan	Wilayah Pedesaan	Total
	Tahun	Tahun	Tahun
	2020	2020	2020
Kecamatan Kedunggalar	7014	19045	26060
Kecamatan Paron	9934	20742	30676
Kecamatan Ngawi	19992	8501	28493

Tabel 2.0 Jumlah Penduduk dan Keluarga

Dijelaskan juga jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Ngawi. Dalam data terakhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
Kecamatan Kedunggalar	5888
Kecamatan Paron	10706
Kecamatan Ngawi	4328

Tabel 2.1 Jumlah Keluarga Miskin

b. Keadaan Perekonomian

Sampai dengan tahun 2014 perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi. Sektor ini mencakup subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sampai dengan tahun 2014 sektor pertanian masih merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kabupaten Ngawi.

c. Kehidupan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Ngawi

Masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya ketiga kecamatan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai petani, pedagang, wiraswasta, dan PNS. Untuk wilayah Kecamatan Paron misalnya, lahan persawahan bahkan lebih besar daripada pemukiman warga. Komoditas utama yang dihasilkan ialah padi, tebu, dan melon.

Sedangkan wilayah Kecamatan Kedunggalar, dengan kontur tanah yang lebih kering dan banyak hutan jati yang masih

asri, komoditas utama yang dihasilkan dari bertani ialah jagung. Untuk wilayah Kecamatan Ngawi, yang sebagian besar masyarakatnya tinggal di kota, mayoritas berprofesi sebagai karyawan, pedagang, maupun PNS. Selain itu komoditas utama disini ialah karya mebel dan kripiik tempe. Dengan cakupan hutan jati yang luas, banyak dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk dijadikan kerajinan mebel dan hiasan furniture. Banyak pelancong dari kota lain bahkan turis mancanegara yang tertarik dengan hiasan tersebut.

Terdapat juga satu desa di Kecamatan Ngawi yang dikhususkan untuk memproduksi kripiik tempe yaitu Desa Sadang. Sebagian besar profesi masyarakat disana sebagai pembuat kripiik tempe. Sehingga kripiik tempe menjadi ikon dan jajanan khas lokal Kabupaten Ngawi. Maka dari itu, dengan potensi yang terdapat di Kabupaten Ngawi menjadikan terbuka lebar lapangan pekerjaan bagi masyarakat.¹

4. Faktor Yang Melatarbelakangi Jual Beli Hewan Langka

Kabupaten Ngawi merupakan wilayah bagian barat merupakan hutan jati yang masih terawat. Masyarakat yang berada di kawasan hutan banyak yang mengandalkan sumber daya yang berasal dari hutan sebagai sumber mata pencaharian. Data yang diperoleh dari dokumen rencana

¹ Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2023, 6.

program investasi jangka menengah Kabupaten Ngawi potensi perekonomian dari sektor hutan dan perkebunan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Namun, masyarakat disana mayoritas hanya sebagai buruh kebun ataupun buruh penebang kayu. Mengingat upah harian yang diberikan dari pekerjaan tersebut jika diakumulasi sebulan kurang dari standart UMK (upah minimum kerja) Kabupaten Ngawi, maka tidak sedikit dari masyarakat yang mencari jalan keluar dari masalah perekonomiannya dengan mencari penghasilan sampingan. Dengan potensi alam yang tinggi serta adanya kesempatan membuat masyarakat mengambil jalan keluar tercepat.²

Jual beli hewan langka di Kabupaten Ngawi sudah tidak asing didengar oleh masyarakat, bahkan beberapa masyarakat menjadikannya sebagai mata pencaharian utama. Beberapa menjadi pengepul dan beberapa menjadi pemburu. Dalam hal ini pembeli juga rata-rata ialah orang yang mempunyai hobi memelihara hewan langka, meskipun mereka sudah tahu jika hal tersebut melanggar peraturan yang ditetapkan. Faktor ekonomi lah yang membuat tindakan perburuan dan penjualan hewan langka menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, didukung pula sumber daya alam yang terjaga sehingga masih terdapat banyak satwa liar di hutan.

² Mas Eko, *Wawancara*, Ngawi 2 Agustus 2020.

5. Pelaksanaan Akad Salam Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi

Praktek jual beli hewan langka dengan akad salam di kabupaten Ngawi ini menggunakan cara yang sebagaimana mestinya akad salam atau pesanan. Dimana pembeli memesan hewan dengan spesifikasi yang diinginkan dan membayar uang dp setelah mengetahui harga yang dipasang oleh penjual diawal akad. Pada awal akad, pembeli (rabb as-salam) berkomunikasi dengan penjual (muslam illaihi) terkait pemesanan hewan apakah penjual (muslam illaihi) sanggup atau tidak. Setelah itu, pihak pembeli (rabb as-salam) menyebutkan secara jelas spesifikasi atau ciri-ciri hewan yang dicari kepada pihak penjual (muslam illaihi). Dalam spesifikasi tersebut mencakup jenis hewan, umur hewan, serta jenis hewan darimana didapatkannya. Ada dua jenis darimana hewan didapatkan, yang pertama ialah BC (*Breed Captive*) yaitu hewan hasil ternakan/ hasil *breeding* dan WC (*Wild Caught/Collect*) yaitu hewan hasil buruan liar.

Jual beli hewan langka yang terjadi di kabupaten Ngawi ialah hewan hasil buruan atau disebut hewan WC (*Wild Caught*). Dimana transaksi tersebut dilakukan oleh dua pihak yang bertemu dari grup sosial media khusus jual beli hewan langka. Setelah pembeli (rabb as-salam) menyebutkan spesifikasi hewan, barulah penjual (muslam illaihi) menentukan harga jual hewan tersebut. Harga jual hewan WC (*Wild Caught*) tergolong lebih murah daripada hewan hasil *breeding*, dikarenakan hewan tersebut ditangkap secara liar tanpa harus merawat dari lahir. Faktor yang menentukan harga hewan ialah jenis hewan, umur hewan, dan

kesehatan hewan. Setelah kedua pihak mengetahui harga, selanjutnya penjual meminta uang jadi atau uang DP sebagai tanda pembeli jadi melakukan jual beli. Selanjutnya, penjual mencari hewan tersebut dengan cara berburu sendiri ke hutan ataupun mencari hewan hasil tangkapan orang lain untuk dijual kembali dengan syarat hewan tersebut sama spesifikasinya.

Dalam praktek jual beli hewan ini, penyerahan hewan dilakukan setelah pembeli melakukan *khiyar* atau pengecekan hewan apakah sama dengan yang dipesan. Dalam prakteknya, hewan hasil tangkapan liar tidak bisa diketahui secara pasti berapa umur hewan tersebut. Hal semacam itu sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli hewan. Padahal pelaksanaan jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad nya, yang seharusnya kondisi sebenarnya diketahui oleh kedua belah pihak. Padahal dalam sistem jual beli akad salam, penyerahan barang tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan serta kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktek ini kedua belah pihak tidak mengetahui secara pasti umur hewan tersebut, yang menjadi patokan dalam jual beli hewan liar ialah kelakuan hewan tersebut. Ada tiga tahapan usia pada hewan liar yaitu *chick* (masih anakan/berbulu kapas), *brancher* (belum bisa berburu), *juve* (bisa berburu sendiri), dan *mature* (dewasa). Dalam penjualan hewan hasil WC hal tersebut sangat sulit diketahui karena semua hewan tangkapan sikapnya masih liar dan sangat sulit dikendalikan.

Dari hasil pengamatan dan penelitian di kabupaten Ngawi, penulis memperoleh beberapa kasus terkait jual beli hewan langka dengan akad salam serta pendapat dari mereka tentang praktik jual beli hewan langka ini. Penulis akan memaparkan komentar tentang praktik jual beli hewan langka menggunakan akad salam dengan narasumber sebanyak 6 orang dimana saling berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

1. Komentar dari Diki 23 tahun selaku pembeli burung hantu

“saya dulu beli burung hantu ya buat coba-coba se mas, soalnya teman rumah ada yang pelihara juga jadi ya pengen nyoba. Kalo masalah hewan dilindungi nggaknya ya kurang tau secara detail mas. Untuk harganya kalo burung hantu standar nya 300 ribuan lah mas.”³

2. Komentar dari Dian 24 tahun selaku pembeli kucing hutan

“saya membeli kucing hutan ya untuk dipelihara kalo gak dijual lagi mas, soalnya hobi juga. Untuk harga kucing hutan biasanya sekitar 300-400 an mas tergantung kondisi hewannya. Kalo masalah peraturan tau kalo kucing hutan dilindungi, masalahnya mahal mas kalo ngurus surat izinnya.”⁴

3. Komentar dari Zaka 21 tahun selaku pembeli alap-alap

“saya memesan alap-alap itu ya untuk dipelihara mas, alasannya ya karena hobi pelihara hewan pemangsa sama reptile mas. Kalau untuk peraturannya tau mas, udah jelas-jelas dilarang kalau alap-alap,

³ Wawancara Diki, 3 Agustus 2020.

⁴ Wawancara dengan Dian, tanggal 2 Agustus 2020.

masalahnya cuma ga sanggup kalau ngurus surat izin pelihara mas. Untuk harga alap-alap tergantung jenisnya mas, kalo punya saya krestel 300 ribuan rata-rata mas.”⁵

4. Komentar dari Eko 38 tahun selaku penjual burung hantu

“sudah lama mas saya jualan hewan ini, soalnya ya hobi pelihara burung hantu juga mas, jadi ya sekalian menyalurkan hobi. Burung hantu ini saya dapatnya dari kenalan-kenalan pemburu/suluh burung gitu mas. Kalo mekanisme pesan ya sedapatnya burung baru setelah itu pembeli saya kabari lagi mas. Untuk harga jual burung hantu bervariasi mas tergantung jenis, untuk kisarannya ya 300 ribu rupiah mas. Biasanya pembelinya kolektor hewan langka mas.”⁶

5. Komentar dari Erik 24 tahun selaku penjual musang dan kucing hutan

“saya jualan ini baru 2 tahunan mas, sebelumnya cuma suka pelihara musang gitu. Untuk harga musang kisaran 200 ribu kalau untuk kucing hutan 300 ribuan mas. Untuk hewannya sendiri dapatnya dari rata-rata dari pengepulnya nanti disana tinggal milih mas. Kalau untuk perizinannya yang saya tau boleh mas asal dikasi makan gitu.

6. Komentar dari Imam 25 tahun selaku penjual alap-alap

“saya sebenarnya ga cuma jual alap-alap mas, kadang burung hantu, kucing hutan, tokek juga mas tergantung yang mesan mas. Untuk hewannya saya dapat dari nyari sendiri mas seringnya, kadang juga

⁵ Wawancara dengan Zaka, tanggal 3 Agustus 2020.

⁶ Wawancara dengan Mas Eko, tanggal 2 Agustus 2020.

dapet dari orang lain kenalan gitu mas. Untuk harga alap-alap itu kisaran 300-900 ribu mas tergantung jenisnya. Kalau alap-alap kestrel 300 ribu udah dapet mas. Terkait perizinan nya tau mas kalau itu melanggar, tapi gimana lagi mas saya dapet uang dari situ mas.”

Dari sekian keterangan dari narasumber di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terkait jual beli hewan langka, sebagian besar mengetahui jikalau praktek tersebut melanggar hukum, akan tetapi dilihat dari aspek ekonomi, banyak yang menjadikan praktek tersebut sebagai lading mencari rejeki. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang wilayah kabupaten Ngawi masih memiliki kawasan hutan yang lebat dan luas, hal tersebut bisa menjadi sarang/hunian hewan-hewan langka dan masyarakat melihat potensi tersebut dan memanfaatkannya sebagai penyangga kehidupan meskipun tak lepas dari hobi sendiri.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD SALAM DALAM JUAL BELI HEWAN LANGKA DI KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Praktik Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi

Sumber daya alam adalah segala bentuk kandungan alam, sebagai nikmat dan kaunia Allah swt yang bisa dieksploitasi dan diolah manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya dan keperluan makhluk-makhluknya. Sumber daya alam tersebut adalah sumber daya mineral, sumber daya laut, sumber daya hutan, dan lain-lain. Salah satu cara memanfaatkan sumber daya tersebut ialah dengan cara jual beli. Jual beli sendiri ialah tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukun tersebut dipenuhi, namun apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Dalam jual beli terdapat dua cara yaitu secara langsung dan cara memesan. Jual beli dengan cara memesan dalam islam disebut dengan akad salam. Akad salam ialah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan spesifikasi yang dijelaskan secara rinci dan mengetahui harga jual barang serta melakukan pembayaran diawal akad, sementara itu

¹ Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qorib* (Bandung: Trigenda karya, 1995), 175.

penyerahan barang dilakukan diakhir akad dengan tahapan khiyar atau pengecekan barang terlebih dahulu. Dari beberapa syarat sahnya jual beli ialah barang tersebut bisa diketahui kejelasannya. Dalam hukum islam barang yang tidak diketahui kejelasannya disebut gharar.

Dari berbagai kasus jual beli barang yang tidak diketahui kejelasannya salah satunya ialah jual beli hewan langka. Dalam masalah ini hewan langka dikatakan barangnya tidak jelas dikarenakan hewan tersebut diperoleh dari hasil berburu di alam liar. Sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjelasan umur hewan tersebut karena dalam jual beli hewan langka umur hewan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi harga. Hal tersebutlah yang terjadi di kabupaten Ngawi dimana banyak terdapat praktek jual beli hewan langka hasil buruan dengan cara memesan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi para penjual hewan melaksanakan praktek jual beli hewan langka ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan praktek jual beli hewan langka ini terjadi di kabupaten Ngawi. Diantaranya adalah tingkat perekonomian masyarakat yang mayoritas mengandalkan sektor pertanian seperti menjadi buruh tani yang apabila upah dari hasil bekerja diakumulasi masih belum mencukupi sehingga mencari jalan keluar dan memilih menjual hewan-hewan langka dari hasil buruan.

Selain itu, yang melatarbelakangi banyaknya penjualan hewan langka di kabupaten Ngawi ialah kurangnya kesadaran hukum terkait

praktek jual beli hewan langka, mengingat di kabupaten Ngawi terdapat wilayah hutan yang luas dan ekosistem yang masih terjaga sehingga masih terdapat banyak sekali hewan langka yang hidup. Hal tersebut menjadikan adanya kesempatan untuk dimanfaatkan mereka dengan berburu dan dijual kepada para kolektor hewan maupun masyarakat umum. Praktek seperti itu sudah lama adanya di lingkup kabupaten Ngawi dan sekitar semenjak ada *marketplace online* yang memfasilitasi. Para penjual dan pembeli dikelompokkan dalam suatu grup dan dengan sangat mudah berkomunikasi dan bertransaksi.

Para penjual rata-rata mendapatkan hewan tersebut dari para pemburu setelah calon pembeli memberikan spesifikasi hewan yang diinginkan. Indikator penentuan harga hewan ialah dari jenisnya, umurnya, kesehatannya, dan *skill* yang dimiliki. Dalam hal ini, pembeli harus membuat perjanjian diawal untuk menyerahkan DP/uang muka sebagai jaminan tanda pemesanan, selain itu pembeli harus mengambil sendiri hewan tersebut agar dapat melakukan pengecekan/*khiyar* yang merupakan salah satu rukun dalam akad salam.

Dalam praktek jual beli ini terdapat satu hal yang dapat mempengaruhi kesepakatan awal yaitu ketidakjelasan umur hewan. Padahal umur hewan menjadi salah satu indikator penetapan harga hewan. Meskipun begitu, hal semacam itu sudah lumrah dikalangan jual beli hewan langka buruan. Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa penentuan umur suatu hewan dilihat dari perilakunya, tetapi hal tersebut sangat sulit

diketahui pada hewan hasil tangkapan karena semua hewan hasil tangkapan berperilaku sama yaitu liar. Sedangkan penentuan tersebut berpengaruh terhadap harga hewan. Selain itu, hal yang menjadikan akad ini berpotensi adanya masalah ialah jenis hewan yang diperjualbelikan apakah termasuk kedalam hewan yang dilindungi pemerintah atau tidak. Karena tidak semua hewan liar di hutan adalah hewan yang dilindungi.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Salam Dalam Praktik Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi

Sumber daya alam yang ada di alam ini ialah karunia Allah swt ditujukan untuk seluruh makhluknya, terutama manusia. Manusia dapat memanfaatkan seluruh sumber daya guna membantu kehidupannya. Salah satu caranya ialah dengan jual beli. Jual beli adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hubungan tersebut berkaitan juga dengan hak dan kewajiban antara satu manusia dengan manusia lain. Seluruh keterkaitan tersebut diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar seluruh hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antar manusia bisa menjadi harmonis karena tidak ada pihak yang dirugikan.²

Dalam pelaksanaan jual beli tersebut, segala sesuatunya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan pada hukum ekonomi

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 3.

syariah dan kesepakatan jumbuh ulama. Diantara rukun dan syarat dalam jual beli ialah terdapat pihak yang bertransaksi, terdapt objek/barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), adanya nilai tukar barang, dan *sighat* (ijab qabul).

Berdasarkan penjelasan praktek jual beli diatas, dalam fiqh muamalah dianggap sebagai akad salam. Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.³ Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya dilakukan pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di satu majelis. Ulama malikiyyah menjelaskan, *salam* adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁴

Dalam akad salam terdapat beberapa syarat dan rukun seperti yang dijelaskan diatas. Diantaranya adalah *muslam* (pembeli) adalah pihak yang memesan barang, *muslam alaih* (penjual) adalah pihak yang mencarikan dan menyediakan barang, harga barang atau *tsaman*, *muslam fih* atau barang yang diperjualbelikan, dan shigat atau proses ijab dan qabul. Dalam

³ Saprida, Jurnal Ilmu Syariah “*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*”, Bogor: FAI UIKA, Vol. 4 No.1, 2016, 123.

⁴ Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 129.

praktek akad salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi dilihat dari segi syarat dan rukun akad salam sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (*muslam* dan *muslam ilaih*)

Penjual dan pembeli dalam praktek akad salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi adalah orang berakal dan sudah baligh. Dalam hal ini yang menjadi penjual antara lain adalah Bapak Eko, Mas Erik, dan Mas Imam. Sedangkan untuk pembeli yaitu Mas Zaka, Dian, dan Diki. Ketiga majelis akad tersebut berada di kecamatan yang berbeda-beda sesuai dengan rumah dari penjualnya. Ketiga kecamatan yaitu kecamatan Paron, kecamatan Ngawi, dan kecamatan Kedunggalar dimana masih banyak hewan yang tersebar di hutan. Dalam hal ini sudah terpenuhi rukun pertama dari akad salam yang berarti diperbolehkan.

2. Barang yang diperjualbelikan atau *muslam fih*

Dalam praktek akad salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi, barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat barang yang dapat diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan tidak merupakan barang najis, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, serta memiliki nilai jual sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, hewan liar bukanlah termasuk barang yang najis kecuali untuk dimakan dan hewan tersebut tidak dalam keadaan mati. Hewan disini juga

memiliki nilai jual yang untuk sebagian orang dijadikan sebagai mata pencaharian. Sehingga dalam hal ini barang tersebut bisa dikategorikan sebagai penunjang ekonomi masyarakat.

- b. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan. Dalam praktik jual beli hewan langka ini barang yang diserahkan terimakan ialah hewan hasil buruan itu sendiri. Dalam proses serah terima hewan ini dilakukan *khiyar* terlebih dahulu oleh *muslim alaih* untuk mengecek spesifikasi hewan tersebut. Dalam proses ini rentan terjadinya spekulasi kualitas hewan tersebut dilihat dari usia menurut perilaku hewan. Dikarenakan semua hewan hasil buruan memiliki perilaku yang liar beda dengan hewan hasil ternak sendiri, maka potensi kerugian bisa dialami oleh pembeli karena harga sudah disepakati di awal akad.
 - c. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Hewan yang menjadi objek jual beli ialah sepenuhnya milik penjual. Penjual sendiri mendapatkan hewan dengan cara berburu sendiri ke hutan, ataupun membeli kepada orang lain sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli.
3. Nilai tukar pengganti barang ialah berupa uang dengan jumlah yang telah disepakati di awal akad. Sesuai yang dijelaskan dalam bab III bahwa transaksi ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah uang muka sebagai tanda jadi transaksi dikarenakan barang masih belum ada di majelis awal. Selanjutnya pembayaran dilunasi setelah pembeli telah

melakukan *khiyar* diakhir akad serta telah menerima hewan yang dipesan.

4. *Sighat* atau ijab dan kabul.

Dalam praktik akad salam dalam jual beli hewan langka ini, antara penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli hewan langka menggunakan akad salam, dimana dalam awal akad sudah dijelaskan secara rinci berapa harga untuk hewan yang dipesan. Dalam proses ijab dan kabul ini dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli.

5. *Khiyar* dalam akad ini telah dijelaskan pada bab III yakni terjadi sebelum penyerahan hewan yang sudah dibeli. Dalam *khiyar* binatang, seperti yang tertulis dalam teori pada bab II bahwa *khiyar* binatang berlaku selama tiga sampai lima hari. Selama kurun waktu tersebut pembeli melakukan pengamatan apakah hewan yang dipesan sesuai dengan kriteria atau tidak. Dalam hal ini ialah mencari tahu *skill* atau kemampuan yang terdapat dalam hewan tersebut, karena tidak bisa dilihat secara langsung seketika itu juga. Apabila waktu telah mencapai tiga sampai lima hari tersebut selanjutnya diserahkan kepada pembeli apakah jadi untuk membeli atau tidak meskipun *skill* yang dimiliki hewan tersebut belum terlihat. Selanjutnya, apabila pembeli mempunyai keputusan untuk membeli, sudah selesai lah akad jual beli tersebut dan penjual sudah lepas tangan.

C. Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Hewan

Langka Di Kabupaten Ngawi

Pada bab III dijelaskan tentang permasalahan dalam akad salam ini selain ketidakjelasan pada umur hewan tersebut ialah terhadap perizinan untuk memelihara hewan ini. Dalam pemeliharaan hewan hasil buruan, tidak semua jenis hewan bisa dipelihara secara langsung. Ada beberapa proses perizinan yang wajib diperhatikan agar tidak melanggar apa yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Merujuk pada itu, pengelompokan hewan merujuk pada undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen yang mewadahi umat Islam juga mengeluarkan peraturan tentang pelestarian hewan langka seperti yang dijelaskan pada bab II.

Dalam praktik yang terjadi disini, setelah mewawancarai beberapa narasumber yang menjalankan praktik jual beli hewan langka ini, diketahui beberapa hewan yang dikategorikan dalam peraturan menteri lingkungan hidup tentang jenis tumbuhan dan hewan sebagai hewan yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, seperti kucing hutan (*Prionailurus Planiceps*), burung hantu serak jawa (*Tyto Alba*), Alap-Alap (*Falconidae*), dan musang pandan (*Paradoxurus Hermaphroditus*). Dari beberapa klasifikasi hewan yang diperjualbelikan tersebut, kucing hutan dan alap-alap merupakan hewan yang dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi, sehingga praktik jual beli hewan tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan

serta melanggar fatwa MUI tentang pelestarian nomor 4 tahun 2014 dalam ketentuan umum bahwa melarang melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal serta pemanfaatan lainnya kecuali telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam al-qur'an juga dijelaskan tentang larangan berbuat kerusakan di bumi, termasuk didalamnya terhadap satwa langka, antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 56 dan surat Al-Rum ayat 41 yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56)⁵

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِيُذِيقَهُمْ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)⁶

Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana perbuatan manusia di bumi dan petunjuk bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dari kerusakan.

⁵ Fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka, 4.

⁶ Ibid, 5.

Sesuai juga dengan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 106 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi apakah hewan tersebut termasuk kedalamnya atau tidak. Dari jual beli yang telah terjadi diatas dipastikan bahwa terdapat salah satu hewan yang termasuk kedalam status langka dan dilindungi dalam artian tidak boleh diperjualbelikan. Maka, status jual beli tersebut jelas melanggar peraturan yang telah dibuat. Salah satu jenis hewan yang dilarang untuk diperjualbelikan ialah landak jawa atau *Hystrix Javanica*. Berdasarkan proses transaksi yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang muncul ialah tentang penentuan umur hewan tersebut dikarenakan hewan didapatkan dari alam bebas, hal inilah yang menjadikan transaksi tersebut bersifat spekulasi (*gharar*) yang berpotensi merugikan pembeli dikarenakan harga yang dipatok tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, objek dalam jual beli ini ialah sesuatu yang dilarang dalam aturan pemerintah serta melanggar fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian satwa. Dalam hal ketidaktahuan berapa umur hewan tersebut, transaksi jual beli hewan langka ini didasari dengan kerelaan/keridhoan kedua belah pihak. Dalam Islam keridhoan dalam pelaksanaan jual beli merupakan prinsip dasar jual beli, oleh karena itu transaksi bisa dikatakan sah apabila kedua belah pihak merasa ridho terhadap proses jual beli ini. Namun dalam hal ini, bisa jadi dalam proses jual beli salah satu pihak merasa ridho, namun dikemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan.

Dengan adanya tidak terpenuhi dua syarat dalam akad salam ini, praktik akad salam dalam jual beli hewan langka ini dikatakan *fasid* (rusak) karena jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya serta hilangnya keridhoan dikemudian hari, maka akad tersebut bisa dikatakan *fasid* (rusak) dan dihukumi batal, mayoritas ulama menyamakan antara *fasid* dan batal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam hal ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan, diantaranya:

1. Dalam praktik akad salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi dilakukan sebagaimana akad salam pada umumnya, dimana penjual dan pembeli bertemu terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan untuk menentukan hewan apa yang akan dipesan dengan spesifikasi yang dijelaskan secara rinci, selain itu untuk membayar uang muka sebagai uang tanda jadi transaksi. Selanjutnya pembeli menunggu hewan yang dipesan ada sembari penjual mencari hewan yang dipesan dengan cara mencari sendiri di hutan ataupun membeli dari orang lain. Setelah barang didapatkan selanjutnya ialah proses khiyar dan pelunasan uang kepada penjual. Harga ditentukan dari jenis hewan, umur hewan, serta kesehatan hewan. Pematokan harga menggunakan standar harga pada pasaran agar yang beredar. Dalam praktik ini diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadikan timbulnya permasalahan yaitu tidak diketahuinya umur hewan hasil buruan tersebut serta hewan yang diperjualbelikan termasuk

kedalam hewan yang dilindungi oleh pemerintah sehingga dilarang untuk diperjualbelikan.

2. Hukum praktik akad salam dalam jual beli hewan langka di kabupaten Ngawi ialah *fasid* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat akad salam dalam hal tidak diketahuinya spesifikasi barang secara jelas yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) serta barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang haram karena menurut fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian bahwa melarang perburuan serta perdagangan ilegal satwa yang dilindungi kecuali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Kepada para penjual satwa langka disarankan agar untuk mencaritau dan memahami tentang perundang-undangan terkait larangan perdagangan satwa yang dilindungi, serta disarankan untuk mengetahui apakah hewan tersebut termasuk kedalam golongan hewan yang dilindungi atau tidak sehingga dapat meminimalisir punahnya hewan tersebut.
2. Untuk para pembeli agar lebih mengetahui tatacara pemeliharaan hewan langka dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disarankan apabila hendak memelihara hewan langka tersebut untuk mendaftarkan izin kepada Balai Konservasi terdekat sesuai prosedur dan tahapan yang harus dilalui sehingga dapat meminimalisir praktik seperti ini terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2003.

Az-Zuhaili Wahabah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani, 2017.

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Aksara. 1997.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponegoro.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan *terjemahnya*, Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2010.

Dimyauddin Djuwaini, *Penyantar fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Djamal Irwan, Zoer'aini. *Prinsip-Prinsip Ekologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.

Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, Cet. II, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Fatwa MUI Nomor 4 Nomor 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

H.M Musfiquon. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi, jilid-1*; Yogyakarta: Andi. 2004.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jazil Syaiful, *Fiqih Mu'amalah*, Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.

Kholaf Hibatullah, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jua Beli Busana Di Kusuma Fashion Dengan Sistem Online Booking No Cancel Di Surabaya*”. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi), Depok: PT Kharisma Putra Utama.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Maradani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qorib*, Bandung: Trigenda karya, 1995.

Musafa'ah Suqiyah. dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, Surabaya: IAIN SA Press. 2013.

Mustofa imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Nadrattuzaman Hosen, Jurnal *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jakarta: Al-Iqtisad, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Peter salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta:Moderen Engglis Pres, 1999.

Pro Fauna. *Islam Peduli Terhadap Satwa*. Malang: Pro Fauna. 2010.

Qurrotul Ainiyah, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pre Order Online Di Toko Online Comfortable Clothing Sidoarjo*”. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Saprida, Jurnal Ilmu Syariah “*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*”, Bogor: FAI UIKA, Vol. 4 No.1, 2016.

Sholihuddin, Muh, dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN SA Press. 2013.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta. 2008.

Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. (Yogyakarta: Rineka, 1998)

Sulistiyo Budi Prabowo, Skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UINSA Press. Cet.1. 2014.

Utami, Ulfa., *Konservasi Sumber Daya Alam Prespektif Islam dan Sains*. Malang: UIN Malang Press. 2014.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2003.